



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3221585
Website : <http://dpmd.kalteng.go.id>, Email : dpmdes.provkalteng@gmail.com**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/273/2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;

- ss. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya memungkinkan selesainya dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022.

Dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi 5 Bab. Sesuai dengan kedudukan, peran serta fungsinya sebagai dokumen yang cukup penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, maka selaknyalah penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini perlu disempurnakan melalui kritikan, masukan, saran, konsultasi dan kesepakatan dari berbagai pihak terutama stakeholder pembangunan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, demi kesempurnaan serta bermanfaatnya dokumen ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini.

Palangka Raya, 28 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas,

Drs. ROJIKINNOR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670510 199403 1 011



Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
 BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	10
2.3. Isu-isu Penting Pembangunan Tugas dan Fungsi.....	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	30
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	31
 BAB V PENUTUP	38



Daftar Tabel

Halaman

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	5
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.....	11
2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	15
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	22
4.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....	34



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai Tupoksinya.

Pemberdayaan Masyarakat pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dipedesaan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menyelaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan serta berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen Rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum rencana kerja sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan Nasional adalah "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat";
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

- (1) Merumuskan arah Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Merupakan rujukan arah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun;
- (3) Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan uraian mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2020

Berisikan uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Bab V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Tahun 2020 dari dana DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan dana sebesar Rp.16.182.858.784,- yang telah terealisasi keuangannya sebesar Rp. 15.032.480.043,- atau 92,89 % sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100 %. Realisasi anggaran yang belum mencapai 100%, hal ini dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : 1) terdapatnya sisa dana untuk pembayaran gaji pegawai yang cukup besar nilainya, 2) terdapat sisa perjalanan dinas, 3) terdapat sisa dana yang tidak bisa digunakan lagi.

Adapun evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun Lalu (2019) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW IV 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																Dinas PMD	
	2 07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																Dinas PMD	
	2 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																Dinas PMD	
1	2 07 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			15.309.898.800,-		10.757.884.974,-		2.285.633.433,-		2.116.167.547,-				12.874.052.521,-			Dinas PMD	
	2 07 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat yg dikeluarkan	7.000	63.575.000,-	5.600	49.971.480,-	1.400	12.715.000,-	1.400	12.534.000,-	100,00	98,58	7.000	62.505.480,-	100,00	98,32		
	2 07 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran biaya rek. telp, listrik dan air	25	1.184.000.000,-	20	759.333.650,-	5	235.814.600,-	5	191.417.339,-	100,00	81,17	25	950.750.989,-	100,00	80,30		
	2 07 01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Asuransi gedung kantor	5	100.000.000,-	4	79.941.878,-	1	20.000.000,-	1	19.997.251,-	100,00	99,99	5	99.939.129,-	100,00	99,94		
	2 07 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pajak & perpanjangan stnk	95	50.000.000,-	79	25.716.200,-	28	12.500.000,-	28	7.104.400,-	100,00	56,84	107	32.820.600,-	112,63	65,64		
	2 07 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan aset	Pengelola keu & tenaga kontrak	245	4.982.235.000,-	196	3.045.225.100,-	37	286.794.200,-	37	245.133.525,-	100,00	85,47	233	3.290.358.625,-	95,10	66,04		
	2 07 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cleaning service dan alat kebersihan	100	303.975.000,-	76	352.481.700,-	20	133.318.200,-	20	125.082.150,-	100,00	93,82	96	477.563.850,-	96,00	157,11		
	2 07 01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yg diservice	60	75.000.000,-	48	60.000.000,-	12	15.000.000,-	12	14.985.000,-	100,00	99,90	60	74.985.000,-	100,00	99,98		
	2 07 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	105	107.500.000,-	86	85.989.300,-	23	16.124.900,-	23	16.109.000,-	100,00	99,90	109	102.098.300,-	103,81	94,98		
	2 07 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan penggandaan dokumen/ surat	228.250	157.500.000,-	271.300	182.989.875,-	75.000	17.916.800,-	75.000	17.912.400,-	100,00	99,98	346.300	200.902.275,-	151,72	127,56		
	2 07 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	55	350.000.000,-	52	214.760.000,-	11	26.900.000,-	11	26.890.500,-	100,00	99,96	63	241.650.500,-	114,55	69,04		
	2 07 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pembelian peralatan dan	30	225.000.000,-	35	1.114.350.511,-	-	-	-	-	-	-	35	1.114.350.511,-	116,67	495,27		
	2 07 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	50	50.000.000,-	34	203.572.000,-	5	19.000.000,-	5	18.950.000,-	100,00	99,74	39	222.522.000,-	78,00	445,04		
	2 07 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/ surat kabar/ majalah	20	4.665.490.000,-	14	1.004.494.800,-	3	23.538.607,-	3	18.840.000,-	100,00	80,04	17	1.023.334.800,-	85,00	21,93		
	2 07 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Snack dan makan minum rapat	20	50.000.000,-	24	78.742.850,-	1	55.000.000,-	1	54.958.590,-	100,00	99,92	25	133.701.440,-	125,00	267,40		
	2 07 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	75	1.032.245.000,-	86	998.907.470,-	1	156.907.300,-	1	156.203.916,-	100,00	99,55	87	1.155.111.386,-	116,00	111,90		
	2 07 01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Perjalanan dinas ke dalam daerah	125	1.288.522.000,-	218	1.382.486.360,-	1	463.296.626,-	1	463.296.626,-	100,00	100,00	219	1.845.782.986,-	175,20	143,25		
	2 07 01 01 20	Rujukan berobat PNS	Bantuan berobat pegawai BPMPD	0	0,-	-	0,-	-	0,-	-	0,-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 01 23	Pembinaan Non PNS	Jumlah tenaga kebersihan	6	180.720.000,-	35	742.135.000,-	1	774.157.200,-	1	710.102.850,-	100,00	91,73	36	1.452.237.850,-	600,00	803,58		
	2 07 01 01 54	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin	1	294.136.800,-	1	294.136.800,-	-	-	-	-	-	-	1	294.136.800,-	100,00	100,00		
	2 07 01 01 71	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah website kantor	1	150.000.000,-	1	82.650.000,-	1	16.650.000,00	1	16.650.000,00	100,00	100,00	2	99.300.000,-	200,00	66,20		
2	2 07 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.410.000.000,-		1.450.970.874,-		278.968.700,-		278.192.153,-				1.729.163.027,-			Dinas PMD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2019) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW IV 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	2 07 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	20	700.000.000,-	2	587.667.250	-	-	-	-	-	-	2	587.667.250,-	10,00	83,95		
	2 07 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bahan baku bangunan	50	185.000.000,-	50	333.187.900	15	118.968.700,00	15	118.313.900,00	100,00	99,45	65	451.501.800,-	130,00	244,06		
	2 07 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	95	325.000.000,-	88	383.724.724	22	140.000.000,00	22	139.878.253,00	100,00	99,91	110	523.602.977,-	115,79	161,11		
	2 07 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	100	100.000.000,-	67	79.975.000	23	20.000.000,00	23	20.000.000,00	100,00	100,00	90	99.975.000,-	90,00	99,98		
	2 07 01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Persentase capaian rehap gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 02 198	Penyebaran Data dan Informasi	Jumlah kegiatan yang diikuti utk penyebaran	4	100.000.000,-	4	66.416.000	-	-	-	-	-	-	4	66.416.000,-	100,00	66,42		
3	2 07 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			478.020.000,-		423.256.900,-		0,-		0,-				423.256.900,-			Dinas PMD	
	2 07 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas kantor	400	350.000.000,-	230	346.228.900	-	-	-	-	-	-	230	346.228.900,-	57,50	98,92		
	2 07 01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu	21	128.020.000,-	21	77.028.000	-	-	-	-	-	-	21	77.028.000,-	100,00	60,17		
4	2 07 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150.000.000,-		340.984.761,-		2.290.700,-		2.290.700,-				343.275.461,-			Dinas PMD	
	2 07 01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Perjalanan dinas	30	150.000.000,-	81	340.984.761	13	2.290.700,00	13	2.290.700,00	100,00	100,00	94	343.275.461,-	313,33	228,85		
5	2 07 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			2.174.300.800,-		1.413.681.023,-		207.630.119,-		205.562.345,-				1.619.243.368,-			Dinas PMD	
	2 07 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	200	30.000.000,-	121	30.766.455	-	-	-	-	-	-	121	30.766.455,-	60,50	102,55		
	2 07 01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen	400	30.000.000,-	245	54.789.430	15	11.609.600,00	15	11.595.975,00	100,00	99,88	260	66.385.405,-	65,00	221,28		
	2 07 01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen	200	15.000.000,-	80	12.998.315	-	-	-	-	-	-	80	12.998.315,-	40,00	86,66		
	2 07 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen	200	15.000.000,-	125	40.773.480	40	10.881.400,00	40	10.881.300,00	100,00	100,00	165	51.654.780,-	82,50	344,37		
	2 07 01 01 06	Penyusunan RKA SKPD	Dokumen RKA/DPA dan RKPA/DPPA	1.000	85.000.000,-	1.006	184.973.250	80	44.550.000,00	80	44.550.000,00	100,00	100,00	1.086	229.523.250,-	108,60	270,03		
	2 07 01 06 14	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	270	32.397.000,-	100	33.667.200	12	16.800.000,00	12	15.300.000,00	100,00	91,07	112	48.967.200,-	41,48	151,15		
	2 07 01 06 15	Penyusunan renja SKPD	Jumlah dokumen	50	124.941.000,-	50	66.088.875	15	54.400.000,00	15	54.399.950,00	100,00	100,00	65	120.488.825,-	130,00	96,44		
	2 07 01 06 33	Penyusunan laporan TEPPRA/ SIMPPD	Honor operator dan jumlah dokumen	258	346.038.000,-	98	157.817.950	15	42.000.000,00	15	41.500.000,00	100,00	98,81	113	199.317.950,-	43,80	57,60		
	2 07 01 06 89	Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah evaluasi program kegiatan ke kabupaten	648	1.075.924.800,-	286	772.236.093	20	27.389.119,00	20	27.335.120,00	100,00	99,80	306	799.571.213,-	47,22	74,31		
	2 07 01 06 90	Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah peserta raker	117	420.000.000,-	39	59.569.975	-	-	-	-	-	-	39	59.569.975,-	33,33	14,18		
6	2 07 01 08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/ Barang Daerah			977.240.000,-		472.935.335,-		79.117.000,-		68.913.900,-				541.849.235,-			Dinas PMD	
	2 07 01 08 01	Pengelolaan inventaris barang daerah	Honor pengelola barang daerah dan jumlah dokumen	125	977.240.000,-	94	472.935.335	24	79.117.000,00	24	68.913.900,00	100,00	87,10	118	541.849.235,-	94,40	55,45		
7	2 07 01 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			12.182.729.150,-		13.162.617.110,-		4.455.171.700,-		4.346.951.520,-				17.509.568.630,-			Dinas PMD	
	2 07 01 15 05	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)	Jumlah laporan	5.214	13.000.000,-	3.456	7.157.521.777	1.722	1.849.191.000,00	1.722	1.753.980.700,00	100,00	94,85	5.178	8.911.502.477,-	99,31	68.550,0		
	2 07 01 15 07	Lomba pokjanal posyandu	Jumlah kab/ kota yang mendapat penilaian	70	500.000.000,-	2.282	582.210.636	-	-	-	-	-	-	2.282	582.210.636,-	3.260,00	116,44		
	2 07 01 15 08	Pelaksanaan PMT-AS	Jumlah Kab/ kota yg melaksanakan PMT-AS	30	315.000.000,-	12	142.908.600	-	-	-	-	-	-	12	142.908.600,-	40,00	45,37		



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2019) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW IV 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	2 07 01 15 09	Pelaksanaan profil desa/ kelurahan	Jumlah desa/ kel yg melaksanakan profil desa	150	344.442.000,-	49	114.814.966	-	-	-	-	-	-	49	114.814.966,-	32,67	33,33		
	2 07 01 15 10	Pelaksanaan penilaian P2W-KSS	Jumlah kab/ kota yg mengikuti penilaian P2W-KSS	40	750.000.000,-	7	87.212.200	-	-	-	-	-	-	7	87.212.200,-	17,50	11,63		
	2 07 01 15 11	Sosialisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Jumlah peserta sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 07 01 15 13	Sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	180	87.000.000,-	60	29.000.000	-	-	-	-	-	-	60	29.000.000,-	33,33	33,33		
	2 07 01 15 19	PAP PNPMD Generasi	Jumlah dokumen laporan	5	331.025.000,-	21	192.891.310	-	-	-	-	-	-	21	192.891.310,-	420,00	58,27		
	2 07 01 15 20	Penguatan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kab/kota yg terfasilitasi dlm	70	9.684.163.000,-	48	4.507.435.576	13	2.605.980.700,00	13	2.592.970.820,00	100,00	99,50	61	7.100.406.396,-	87,14	73,32		
	2 07 01 15 21	Pekan Inovasi Pengembangan Desa (PIN)	Jumlah dokumen laporan	3	158.099.150,-	2	348.622.045	-	-	-	-	-	-	2	348.622.045,-	66,67	220,51		
8	2 07 01 16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			5.930.179.500,-		3.470.661.532,-		25.853.800,-		25.853.800,-				3.496.515.332,-			Dinas PMD	
	2 07 01 16 08	Penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro didaerah tertinggal dan pusat kemiskinan daerah	Jumlah peserta pelatihan	150	350.000.000,-	30	67.302.800	-	-	-	-	-	-	30	67.302.800,-	20,00	19,23		
	2 07 01 16 09	Penguatan lembaga pasar desa untuk pemasaran hasil produksi UEM	Laporan penilaian lomba	5	627.500.000,-	3	301.697.000	-	-	-	-	-	-	3	301.697.000,-	60,00	48,08		
	2 07 01 16 10	Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan	5	513.575.000,-	21	286.367.100	-	-	-	-	-	-	21	286.367.100,-	420,00	55,76		
	2 07 01 16 11	Pemanfaatan SDA pedesaan bagi pembangunan ketahanan masyarakat (CPPD)	Jumlah peserta	150	350.000.000,-	140	325.654.850	78	16.756.700,00	78	16.756.700,00	100,00	100,00	218	342.411.550,-	145,33	97,83		
	2 07 01 16 15	Bantuan paket modal BUMDes lengkap dengan buku administrasi	Jumlah kab/kota yg mendapat bantuan	10	722.500.000,-	2	133.135.000	-	-	-	-	-	-	2	133.135.000,-	20,00	18,43		
	2 07 01 16 17	Pelaksanaan pameran	Jumlah dokumen laporan	10	1.741.360.000,-	9	1.115.262.625	-	-	-	-	-	-	9	1.115.262.625,-	90,00	64,05		
	2 07 01 16 22	Pembangunan pasar desa	Jumlah kab yg terfasilitasi dalam	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 16 23	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya Meningkatkan Ekonomi Keluarga	Jumlah yang mengikuti Pelatihan	160	400.000.000,-	130	394.717.192	-	-	-	-	-	-	130	394.717.192,-	81,25	98,68		
	2 07 01 16 24	Pelatihan Desa Online	Jumlah peserta Pelatihan	120	252.000.000,-	40	81.468.000	-	-	-	-	-	-	40	81.468.000,-	33,33	32,33		
	2 07 01 16 25	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa	Jumlah peserta bimtek	120	252.000.000,-	80	191.910.600	-	-	-	-	-	-	80	191.910.600,-	66,67	76,16		
	2 07 01 16 26	Bimbingan Teknis BUMDes	Jumlah peserta bimtek	150	315.000.000,-	50	100.200.000	-	-	-	-	-	-	50	100.200.000,-	33,33	31,81		
	2 07 01 16 27	Lomba Pasar Desa	Jumlah pasar desa yang mengikuti lomba	39	78.000.000,-	26	130.020.000	-	-	-	-	-	-	26	130.020.000,-	66,67	166,69		
	2 07 01 16 28	Koordinasi Konsultasi Penguatan Pasar Desa	Jumlah koordinasi dan konsultasi	15	78.244.500,-	6	96.466.375	16	9.097.100,-	16	9.097.100,-	100,00	100,00	22	105.563.475,-	146,67	134,91		
	2 07 01 16 29	Rakernis Badan Usaha Milik Desa se-Kalteng	Jumlah peserta rakernis	400	250.000.000,-	400	246.459.990	-	-	-	-	-	-	400	246.459.990,-	100,00	98,58		
9	2 07 01 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa			6.272.400.000,-		4.796.113.394,-		117.879.000,-		117.808.573,-				4.913.921.967,-			Dinas PMD	
	2 07 01 17 05	Pelaksanaan PM2L	Jumlah dokumen laporan	5	446.000.000,-	1	75.751.476	-	-	-	-	-	-	1	75.751.476,-	20,00	16,98		
	2 07 01 17 06	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan tingkat Provinsi Kalteng	Jumlah dokumen laporan	85	1.000.000.000,-	56	1.491.968.031	25	27.320.300,00	25	27.320.300,00	100,00	100,00	81	1.519.288.331,-	95,29	152		
	2 07 01 17 08	Pencanangan bulan bakti gotong royong masyarakat	Jumlah dokumen laporan	80	2.000.000,-	34	1.409.405.247	2	85.100.000,00	2	85.029.573,00	100,00	99,92	36	1.494.434.820,-	45,00	74,722		
	2 07 01 17 10	Rapat kerja teknis pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Jumlah aparaturnya yg menjadi peserta rakernis	160	490.000.000,-	39	57.554.950	-	-	-	-	-	-	39	57.554.950,-	24,38	11,75		
	2 07 01 17 11	Sosialisasi Penanganan HIV-AIDS	Jumlah peserta sosialisasi	200	750.000.000,-	40	149.440.000	-	-	-	-	-	-	40	149.440.000,-	20,00	19,93		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2019) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW IV 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
	2 07 01 17 12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	175	2.678.400.000,-	70	989.031.082	-	-	-	-	-	-	70	989.031.082,-	40,00	36,93		
	2 07 01 17 20	Validasi Data dan Kodifikasi Nama Desa	Perjalanan dinas dalam daerah	39	133.200.000,-	1.446	83.589.050	-	-	-	-	-	-	1.446	83.589.050,-	3.707,69	62,75		
	2 07 01 17 21	Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Desa	Jumlah peserta pelatihan	120	340.500.000,-	160	207.030.700	-	-	-	-	-	-	160	207.030.700,-	133,33	60,80		
	2 07 01 17 22	Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Perjalanan dinas dalam daerah	39	432.300.000,-	25	332.342.858	1	5.458.700,00	1	5.458.700,00	100,00	100,00	26	337.801.558,-	66,67	78,14		
10	2 07 01 18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			13.920.435.000,-		8.932.872.815,-		1.920.178.300,-		1.715.888.775,-				10.648.761.590,-			Dinas PMD	
	2 07 01 18 05	Rakor Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah aparatur desa yg mampu mengelola	150	388.250.000,-	60	174.329.642	-	-	-	-	-	-	60	174.329.642,-	40,00	44,90		
	2 07 01 18 06	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Kabupaten/ Kota	Perjalanan dinas dalam daerah	100	837.500.000,-	73	602.693.551	17	505.000,00	17	505.000,00	100,00	100,00	90	603.198.551,-	90,00	72,02		
	2 07 01 18 07	Monitoring Penyaluran Bantuan Keuangan dan Dana Desa	Jumlah tim verifikasi dan monitoring	35	299.500.000,-	1.455	909.996.379	1.433	162.500.000,00	1.433	161.650.250,00	100,00	99,48	2.888	1.071.646.629,-	8.251,43	357,81		
	2 07 01 18 08	Pelaksanaan pembinaan pemdes dan kel pada desa model	Jumlah desa model yg dibina	35	300.000.000,-	7	59.588.910	-	-	-	-	-	-	7	59.588.910,-	20,00	19,86		
	2 07 01 18 09	Pelatihan pemantapan tupoksi BPD	Jumlah peserta pelatihan	160	480.000.000,-	170	302.692.575	-	-	-	-	-	-	170	302.692.575,-	106,25	63,06		
	2 07 01 18 11	Pelatihan manajemen keuangan dan aset desa	Jumlah aparatur desa yg mengikuti pelatihan	160	480.000.000,-	30	79.931.750	-	-	-	-	-	-	30	79.931.750,-	18,75	16,65		
	2 07 01 18 15	Sosialisasi Peraturan Mengenai Desa	Jumlah aparatur yg mengikuti sosialisasi	600	492.125.500,-	440	953.554.246	-	-	-	-	-	-	440	953.554.246,-	73,33	193,76		
	2 07 01 18 16	Kaji banding pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	Jumlah yg mengikuti kaji banding ke luar daerah	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 18 17	Bimtek pemantapan pemerintahan kelurahan	Jumlah peserta bimtek	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 18 18	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	Jumlah desa/kel yg mendapat pembinaan	600	1.958.059.500,-	240	802.936.574	-	-	-	-	-	-	240	802.936.574,-	40,00	41,01		
	2 07 01 18 19	Bimtek pengadaan barang/jasa di desa	Jumlah peserta bimtek	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 18 20	Inventarisasi aset desa	Jumlah dokumen laporan	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
	2 07 01 18 21	Rakor Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	Jumlah peserta rakor	408	750.000.000,-	272	438.725.042					-	-	272	438.725.042,-	66,67	58,50		
	2 07 01 18 22	Raker Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta raker	4.299	4.770.000.000,-	2.866	2.991.852.151	1.433	1.723.973.300,00	1.433	1.520.720.025,00	100,00	88,21	4.299	4.512.572.176,-	100,00	94,60		
	2 07 01 18 23	Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Desa	Perjalanan dinas dalam daerah	39	300.000.000,-	26	379.823.992	13	20.000.000,00	13	20.000.000,00	100,00	100,00	39	399.823.992,-	100,00	133,27		
	2 07 01 18 24	Penataan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa	78	300.000.000,-	39	190.729.230	13	7.000.000,00	13	6.863.500,00	100,00	98,05	52	197.592.730,-	66,67	65,86		
	2 07 01 18 25	Pemantauan Pilkades Serentak	Desa yang pilkades	87	300.000.000,-	48	198.671.144	5	6.200.000,00	5	6.150.000,00	100,00	99,19	53	204.821.144,-	60,92	68,27		
	2 07 01 18 26	Sosialisasi Pengawasan Dana Desa	Jumlah peserta sosialisasi	2.247	915.000.000,-	749	270.500.700	-	-	-	-	-	-	749	270.500.700,-	33,33	29,56		
	2 07 01 18 27	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	36	300.000.000,-	60	230.098.554	-	-	-	-	-	-	60	230.098.554,-	166,67	76,70		
	2 07 01 18 28	Pembelajaran Pengelolaan Keuangan dan Dana Desa	Jumlah peserta pembelajaran	66	1.050.000.000,-	22	346.748.375	130		-		-	-	22	346.748.375,-	33,33	33,02		
11	2 07 01 19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan			107.094.350,-		402.601.150,-		1.437.425,-		1.437.425,-				404.038.575,-			Dinas PMD	
	2 07 01 19 05	Pelatihan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan di lembaga pemerintahan desa	Jumlah aparatur di lembaga pemerintahan desa yg mengikuti pelatihan	35	107.094.350,-	70	402.601.150	75	1.437.425,00	75	1.437.425,00	100,00	100,00	145	404.038.575,-	414,29	377,27		
12	2 07 01 20	Program Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG)			4.006.000.000,-		3.806.836.458,-		149.045.326,-		144.687.466,-				3.951.523.924,-			Dinas PMD	



No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2019) (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (TW IV 2020) (n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d TW IV 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7 x 100%		10=6+8		11=10/5 x 100%		12	13
2	07 01 20 01	Pola Kemitraan TNI Manunggal Masyarakat Desa (TMMD) dengan Masyarakat.	Jumlah kab/kota yg mendapatkan bantuan stimulan tmmd	5	300.000.000,-	6	369.081.510	1	8.849.101,00	1	8.849.101,00	100,00	100,00	7	377.930.611,-	140,00	125,98		
2	07 01 20 02	Pelaksanaan gelar TTG	Jumlah kab/kota yg mengikuti Gelar TTG Tk. Nasional	70	1.500.000.000,-	40	1.409.396.750	13	21.534.400,00	13	21.534.400,00	100,00	100,00	53	1.430.931.150,-	75,71	95,40		
2	07 01 20 06	Pengembangan dan pematapan kelembagaan posyantek	Jumlah dokumen laporan	25	445.000.000,-	37	546.030.326	-	-	-	-	-	-	37	546.030.326,-	148,00	122,70		
2	07 01 20 08	Peningkatan peran dan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa	Jumlah monev pelaksanaan CSR dan CD	125	467.500.000,-	77	338.074.265	-	-	-	-	-	-	77	338.074.265,-	61,60	72,32		
2	07 01 20 09	Peningkatan dan pemanfaatan SDA di kawasan pesisir	Jumlah peserta rakor	70	650.000.000,-	49	311.702.032	30	12.656.125,00	30	12.646.075,00	100,00	99,92	79	324.348.107,-	112,86	49,90		
2	07 01 20 21	Pengembangan hasil inovasi TTG	Jumlah kab/ kota yg mendapatkan bantuan alat inovasi TTG	-	0,-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0,-	-	-		
2	07 01 20 22	Peningkatan Peran Serta Generasi Muda Desa dan Hak Politik dalam Ketahanan Masyarakat	Peserta penyuluhan	315	450.000.000,-	210	707.356.200	300	104.487.700,00	300	100.139.890,00	100,00	95,84	510	807.496.090,-	161,90	179,44		
2	07 01 20 23	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta rapat	60	193.500.000,-	46	125.195.375	13	1.518.000,00	13	1.518.000,00	100,00	100,00	59	126.713.375,-	98,33	65,48		



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas dimana program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun, baik program dan kegiatan yang bersifat nasional maupun yang bersifat daerah (lokal), walaupun terdapat juga beberapa program dan kegiatan yang baru namun sifatnya lambat perkembangannya dengan menyesuaikan keadaan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah maupun kepentingan yang lain.

Program dan kegiatan yang bersifat rutinitas ini disebabkan antara lain : 1) sesuai dengan kebijakan dari eselon I atau Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; 2) alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah relatif kecil, sehingga untuk membuat program-program baru yang menyentuh langsung ke masyarakat tidak dapat terpenuhi; 3) Program dan kegiatan hanya bersifat pembinaan bukan pelaksana teknis secara langsung.

Sedangkan pengkajian pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 realisasi per kegiatan rata-rata hampir mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			SASARAN	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	6	7	8		10	11	12	13	15
1.	Mewujudkan kualitas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.	a. Jumlah laporan bantuan keuangan provinsi ke desa sebagai penunjang akuntabilitas aparatur desa	379	700	1.000	1.400	379	700	1.000	1.400	
			b. Persentase stakeholder kabupaten penerima pemahaman mengenai peraturan desa	60%	70%	80%	90%	60%	70%	80%	90%	
2.	Mewujudkan peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam perkembangan desa.	2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perkembangan desa.	a. Jumlah lembaga desa yang berpartisipasi dalam pembangunan dan perkembangan desa	26	30	34	38	26	30	34	38	
3.	Mewujudkan tatanan kehidupan sosial dasar masyarakat desa yang maju dan dinamis.	3. Meningkatnya pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa.	a. Persentase peningkatan dan pengembangan pelayanan sosial dasar masyarakat desa	4%	5%	6%	7%	4%	5%	6%	7%	

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			SASARAN	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	6	7	8		10	11	12	13	15
4.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga ekonomi masyarakat perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan.	4. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan masyarakat dan desa.	a. Persentase peningkatan lembaga keuangan mikro perdesaan/Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
			b. Persentase peningkatan jumlah pasar desa/pasar lokal	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
			c. Persentase peningkatan pengembangan unit pangan pada BUMDes	20%	30%	40%	50%	20%	30%	40%	50%	
5.	Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna dalam pembangunan kawasan perdesaan.	5. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di desa.	a. Jumlah alat inovasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat	3 alat	4 alat	5 alat	6 alat	3 alat	4 alat	5 alat	6 alat	
			b. Persentase perkembangan jumlah Posyantek/Posyantekdes/Wartekdesy yang aktif tiap tahun	50%	55%	60%	65%	50%	55%	60%	65%	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka telah dilaksanakan program-program dan kegiatan yang berkaitan dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terutama yang berkaitan dengan menanggulangi kemiskinan daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, agar terjadi sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa program daerah seperti Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan Program-program/Kegiatan yang dibuat oleh masing-masing Kabupaten sebagai program andalan daerah dalam menanggulangi kemiskinan, maupun Program-Program dan kegiatan yang telah ditentukan dan berasal dari pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berpotensi dalam menangani penanggulangan kemiskinan seperti Program-Program dan Kegiatan yang tidak secara langsung menyentuh masyarakat seperti Lomba Desa/Kelurahan, Pengembangan Pokjanal Posyandu, Pelaksanaan Profil Desa/Kelurahan, Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan lain-lain. Sedang Program dan Kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat langsung yaitu Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Serta dalam rangka kepedulian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengusulkan kegiatan Raker Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai salah satu kegiatan strategis.

Namun dalam menjalankan program dan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah kurang maksimal karena kurang didukung oleh alokasi dana yang memadai dalam melaksanakan pembangunan daerah. Hal ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi lima tahunan.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penyesuaian dengan pagu anggaran definitif yang diperoleh dari Pemerintah Daerah serta perubahan kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan daerah. Perkembangan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				14.344.342.662					14.344.342.662
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				9.967.896.662	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				9.967.896.662
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan	20 buku	68.747.876	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan	20 buku	68.747.876
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	16.000.000
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	10.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	10.600.000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	5.000.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen lalip,TEPRA	100 dokumen	227.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen lalip,TEPRA	100 dokumen	227.300.000
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	6.172.421.762	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	6.172.421.762
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	6.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	6.500.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	15 buku	10.881.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	15 buku	10.881.400
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Dokumen laporan keuangan semesteran	10 buku	6.609.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Dokumen laporan keuangan semesteran	10 buku	6.609.600
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
2.13.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	6.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	6.500.000
2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Asuransi gedung kantor DPMDes Prov. kalteng	1 polis	20.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Asuransi gedung kantor DPMDes Prov. kalteng	1 polis	20.000.000
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah BMD yang diinventarisasi	24 Dokumen	17.117.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah BMD yang diinventarisasi	24 Dokumen	17.117.000
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	8.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	8.000.000
2.13.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5 orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5 orang	30.000.000
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	20 orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	20 orang	70.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	20.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	100.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	100.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	70.000.000
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Palangka Raya	Jumlah media informasi	3 media	33.538.607	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Palangka Raya	Jumlah media informasi	3 media	33.538.607
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	94.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	94.500.000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	80 kali	600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	80 kali	600.000.000
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung kantor	1 gedung	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung kantor	1 gedung	250.000.000
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Terkirimnya surat	1400 surat	12.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Terkirimnya surat	1400 surat	12.500.000
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telepon, listrik, air	12 bulan	215.977.417	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telepon, listrik, air	12 bulan	215.977.417
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Honorarium tenaga kontrak	12 bulan	1.538.203.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Honorarium tenaga kontrak	12 bulan	1.538.203.000



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional	25 unit	212.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional	25 unit	212.500.000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 buah	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 buah	20.000.000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Rehabilitasi gedung kantor	1 gedung	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Rehabilitasi gedung kantor	1 gedung	100.000.000
2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana prasarana kantor	24 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana prasarana kantor	24 unit	25.000.000
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa				80.263.500	Program Peningkatan Kerjasama Desa				80.263.500
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi					Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	39 orang	80.263.500	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	39 orang	80.263.500
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				1.531.806.700	Program Administrasi Pemerintahan Desa				1.531.806.700
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	30 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	30 dokumen	100.000.000

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	70 orang	205.243.400	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	70 orang	205.243.400
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	30 dokumen	297.245.200	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	30 dokumen	297.245.200
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	30.000.000	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	202.295.940	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	202.295.940
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	16 kali	30.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas	16 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	150.000.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	150.000.000
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	150.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	150.000.000
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	158.830.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	158.830.000
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	35 kali	70.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas	35 kali	70.000.000
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	108.192.160	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	108.192.160



Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				2.764.375.800	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				2.764.375.800
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	46.161.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	46.161.000
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah kabupaten yang berpartisipasi	2 kab	87.154.320	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah kabupaten yang berpartisipasi	2 kab	87.154.320
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	256.260.080	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	256.260.080
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Palangka Raya	Penguatan SDM pengurus Posyantek TTG	60 orang	135.645.900	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Palangka Raya	Penguatan SDM pengurus Posyantek TTG	60 orang	135.645.900
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Kabupaten yang mengikuti BBGRM	13 kab.	106.750.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Kabupaten yang mengikuti BBGRM	13 kab.	106.750.000
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	80 orang	132.404.500	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	80 orang	132.404.500
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	2.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	2.000.000.000



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Belum mantapnya penyelenggaraan otonomi desa dan tekadnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kalimantan Tengah yang ditargetkan pada Tahun 2019 sebesar 4,61%, tahun 2020 sebesar 4,04%, tahun 2021 sebesar 3,52%, tahun 2022 sebesar 3,03%, tahun 2023 sebesar 2,68% dan tahun 2024 sebesar 2,35%, serta keteresolasian dan rendahnya pembangunan infrastruktur perdesaan adalah merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya usulan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memprioritaskan juga pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan misinya yaitu:

- 1) pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi;
- 2) pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah;
- 3) terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah,

Hal tersebut diatas merupakan tolok ukur juga dalam pengusulan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Prog / Keg/Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen perencanaan	20 buku	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen DPA	40 buku	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen Lakip,TEPRA	100 dokumen	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palangka Raya	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	15 buku	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palangka Raya	Dokumen laporan keuangan semesteran	10 buku	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
2.13.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	
2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palangka Raya	Asuransi gedung kantor DPMDes Prov. kalteng	1 polis	
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah BMD yang diinventarisasi	24 Dokumen	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	10 buku	
2.13.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	5 orang	
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	20 orang	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				

2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan listrik	10 buah	
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 buah	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Buku dan Fotocopy	200 buku	
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Kota Palangka Raya	Jumlah media informasi	3 media	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palangka Raya	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	12 bulan	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	80 kali	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah gedung kantor	1 gedung	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palangka Raya	Terkirimnya surat	1400 surat	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Palangka Raya	Pembayaran biaya rekening telpon, listrik, air	12 bulan	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Palangka Raya	Honorarium tenaga kontrak	12 bulan	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Palangka Raya	Jumlah kendaraan dinas operasional	25 unit	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	3 buah	
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Rehabilitasi gedung kantor	1 gedung	
2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Palangka Raya	Jumlah sarana prasarana kantor	24 unit	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	39 orang	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	30 dokumen	
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	70 orang	
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen	30 dokumen	

2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	15 kali	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	16 kali	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Prov. Kalteng	Jumlah perjalanan dinas	35 kali	
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta	80 orang	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	

2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Palangka Raya	Jumlah kabupaten yang berpartisipasi	2 kab	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Palangka Raya	Penguatan SDM pengurus Posyantek TTG	60 orang	
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Palangka Raya	Jumlah Kabupaten yang mengikuti BBGRM	13 kab.	
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	80 orang	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palangka Raya	Peserta yang mengikuti kegiatan	50 orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari arah kebijakan dan strategi nasional dan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan strategi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada agenda prioritas pemerintah terkait dengan desa melihat pada Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada point ke 3 (tiga) berbunyi “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Kementerian Dalam Negeri dalam aspek pembangunan daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa telah melaksanakan berbagai tugas yaitu:

1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan



urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

Beberapa capaian dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan antara lain:

1. Tersusunnya peraturan perundang-undangan berkenaan dengan desa, meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana terakhir kali telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;
2. Di tahun 2014 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (c) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan (d) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
3. Di tahun 2015 ditetapkan 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, (b) Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (c) Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan (d) Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
4. Di tahun 2016 ditetapkan 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu (a) Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, (b) Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (c) Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, (d) Permendagri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dan (e) Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Kementerian Dalam Negeri memiliki tujuan pengaturan desa yang antara lain adalah:

- a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e) Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada kurun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
- 2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
- 3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
- 4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- 5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.



6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Dilihat dari penjabaran kebijakan nasional yang telah dituang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bahwa arah program dan kegiatannya adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat di pedesaan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan integrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah khususnya yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 pada khususnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 pada umumnya.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- c. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan masyarakat adat dan sosial budaya masyarakat;
- d. Meningkatnya usaha ekonomi produksi masyarakat desa;
- e. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah dituangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapainya.

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah 4 (empat) program dengan total kegiatan 11 (sebelas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

-  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
-  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
-  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
-  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan



-  **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-  **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
-  **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
-  **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa**
 -  **Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa**
 -  **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
 - Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
 - Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa



- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
 - Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- ✚ Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
 Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				14.344.342.662	APBD			14.344.342.662
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				9.967.896.662				9.967.896.662
2.13.01.1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				327.647.876				327.647.876
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kota Palangka Raya	20 buku	68.747.876			20 buku	68.747.876
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Palangka Raya	40 buku	16.000.000			40 buku	16.000.000
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Kota Palangka Raya	40 buku	10.600.000			40 buku	10.600.000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	10 buku	5.000.000			10 buku	5.000.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Lakip, TEPR	Kota Palangka Raya	100 dokumen	227.300.000			100 dokumen	227.300.000
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan				6.196.412.762				6.196.412.762
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Kota Palangka Raya	46 orang	6.172.421.762			46 orang	6.172.421.762
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	10 buku	6.500.000			10 buku	6.500.000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	15 buku	10.881.400			15 buku	10.881.400
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan semesteran	Kota Palangka Raya	10 buku	6.609.600			10 buku	6.609.600
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				43.617.000				43.617.000
2.13.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	10 buku	6.500.000			10 buku	6.500.000
2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi gedung kantor DPMDes Prov. kalteng	Kota Palangka Raya	1 polis	20.000.000			1 polis	20.000.000
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD yang diinventarisasi	Kota Palangka Raya	24 Dokumen	17.117.000			24 Dokumen	17.117.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108.000.000				108.000.000
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	10 buku	8.000.000			10 buku	8.000.000
2.13.01.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Kota Palangka Raya	5 orang	30.000.000			5 orang	30.000.000
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Kota Palangka Raya	20 orang	70.000.000			20 orang	70.000.000
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				918.038.607				918.038.607
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik	Kota Palangka Raya	10 buah	20.000.000			10 buah	20.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	6 buah	100.000.000			6 buah	100.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku dan Fotocopy	Kota Palangka Raya	200 buku	70.000.000			200 buku	70.000.000
2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah media informasi	Kota Palangka Raya	3 media	33.538.607			3 media	33.538.607
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu	Kota Palangka Raya	12 bulan	94.500.000			12 bulan	94.500.000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Kota Palangka Raya	80 kali	600.000.000			80 kali	600.000.000
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000				250.000.000
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 gedung	250.000.000			1 gedung	250.000.000
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.766.680.417				1.766.680.417
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat	Kota Palangka Raya	1400 surat	12.500.000			1400 surat	12.500.000
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya rekening telpon, listrik, air	Kota Palangka Raya	12 bulan	215.977.417			12 bulan	215.977.417
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium tenaga kontrak	Kota Palangka Raya	12 bulan	1.538.203.000			12 bulan	1.538.203.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				357.500.000				357.500.000
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Kota Palangka Raya	25 unit	212.500.000			25 unit	212.500.000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Kota Palangka Raya	3 buah	20.000.000			3 buah	20.000.000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung kantor	Kota Palangka Raya	1 gedung	100.000.000			1 gedung	100.000.000
2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Palangka Raya	24 unit	25.000.000			24 unit	25.000.000
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa				80.263.500				80.263.500
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi				80.263.500				80.263.500
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	Kota Palangka Raya	39 orang	80.263.500			39 orang	80.263.500
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa				1.531.806.700				1.531.806.700
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				1.531.806.700				1.531.806.700
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang terfasilitasi	Kota Palangka Raya	30 dokumen	100.000.000			30 dokumen	100.000.000
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta	Kota Palangka Raya	70 orang	205.243.400			70 orang	205.243.400
2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah perjalanan dinas	Prov. Kalteng	15 kali	30.000.000			15 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen	Kota Palangka Raya	30 dokumen	297.245.200			30 dokumen	297.245.200
2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah perjalanan dinas	Prov. Kalteng	15 kali	30.000.000			15 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Peserta yang mengikuti kegiatan	Kota Palangka Raya	50 orang	202.295.940			50 orang	202.295.940
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas	Prov. Kalteng	16 kali	30.000.000			16 kali	30.000.000
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah peserta	Kota Palangka Raya	80 orang	150.000.000			80 orang	150.000.000
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah peserta	Kota Palangka Raya	80 orang	150.000.000			80 orang	150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah peserta	Kota Palangka Raya	80 orang	158.830.000			80 orang	158.830.000
2.13.04.1.01.16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah perjalanan dinas	Prov. Kalteng	35 kali	70.000.000			35 kali	70.000.000
2.13.04.1.01.19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta	Kota Palangka Raya	80 orang	108.192.160			80 orang	108.192.160
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				2.764.375.800				2.764.375.800
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2.764.375.800				2.764.375.800
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Ada	Jumlah dokumen laporan	Kota Palangka Raya	1 dokumen	46.161.000			1 dokumen	46.161.000
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kabupaten yang berpartisipasi	Kota Palangka Raya	2 kab	87.154.320			2 kab	87.154.320
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah peserta pelatihan	Kota Palangka Raya	100 orang	256.260.080			100 orang	256.260.080
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Penguatan SDM pengurus Posyantek TTG	Kota Palangka Raya	60 orang	135.645.900			60 orang	135.645.900
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kabupaten yang mengikuti BBGRM	Kota Palangka Raya	13 kab.	106.750.000			13 kab.	106.750.000
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	Kota Palangka Raya	80 orang	132.404.500			80 orang	132.404.500
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Peserta yang mengikuti kegiatan	Kota Palangka Raya	50 orang	2.000.000.000			50 orang	2.000.000.000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 yang didalamnya mengandung strategi dan arah kebijakan serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang dipakai sebagai suatu pedoman, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja, memerlukan komitmen dan dukungan semua personil dilingkungan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik , yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Palangka Raya, 28 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas,

Drs. ROJIKINNOR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670510 199403 1 011